

COMPANY PROFILE

**JARINGAN
LEGISLASI
NUSANTARA**

**LEGISLATION
BASED ON LOCAL
VALUE**



www.jaringanlegislasi.id



Tentang Kami

Jaringan Legislasi Nusantara (JALINUSA) merupakan organisasi yang berdiri dibawah CV Jaringan Legislasi Nusantara oleh para ahli hukum dan kebijakan publik yang telah lama berkecimpung dalam proses legislasi di segala tingkatan.

Organisasi ini didirikan untuk membantu lembaga pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kementerian, untuk menyusun naskah akademik maupun drafting rancangan peraturan perundang-undangan secara partisipatif.

MISI

VISI

“Mewujudkan produk legislasi dan kebijakan publik yang mencerminkan nilai yang berkembang di Nusantara”.

- Menjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan;
- Memperkuat jati diri bangsa;
- Menyusun legislasi dan kebijakan berdasarkan bukti ilmiah dan argumentasi rasional;
- Menyalurkan aspirasi masyarakat lokal.



PRODUK KAMI

JALINUSA akan selalu berupaya mengkawinkan' nilai dan isu yang sudah terbukti berhasil secara global dengan konten yang merujuk kepada nilai-nilai yang berkembang di nusantara.



PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

Pelatihan untuk pengembangan kapasitas, terutama mengenai pelatihan dan Bimbingan Teknis Legislative Drafting, kepemimpinan dan kewirausahaan



PERDA DAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Perundang-Undangan beserta naskah akademik yang mencerminkan nilai lokal dalam bingkai global



PENELITIAN DAN PENERBITAN

Mengkaji Kebijakan Publik dan Peraturan Perundang-undangan. Serta menerbitkan analisa terhadap kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan

SPECIAL METODE

DALAM MENGEMBANGKAN DAN MEMBUAT PERATURAN
SERTA KEBIJAKAN, JALINUSA MENGGUNAKAN BEBERAPA
METODE MENYESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK
MASING-MASING WILAYAH ATAU DAERAH

IAK

Integraal Afwegingskader (IAK) atau the Integrated Assessment Framework merupakan metode yang digunakan di Belanda sebelum membuat suatu kebijakan/peraturan baru atau merevisi kebijakan/peraturan yang lama. Metode ini telah digunakan sejak 2011 dengan tujuan menganalisis sumber informasi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan.

RIA

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah suatu metode dalam penyusunan kebijakan dengan pendekatan yang diharapkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dalam penyusunan perundang-undangan. Metode ini berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan banyak digunakan di negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, termasuk Indonesia

ROCCIPI

Metode ROCCIPI merupakan suatu metode untuk menentukan indikator atau faktor subjektif maupun objektif dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baru. Setidaknya ada 7 pendekatan yang saling terkait satu sama lain dalam ROCCIPI, yakni. 1). Rules (aturan-aturan), 2). Opportunity (kesempatan), 3). Capacity, 4). Interest, 5). Communication, 6). Process, 7). Ideology.

LEGAL DOKUMEN

jaringan legislasi nusantara

AKTA NOTARIS



NOTARIS / PPAT ATIKAH MARDIANA, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00030.AH.02.01.TAHUN 2019
Tanggal 03 Januari 2019

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

..... CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

BERKEDUDUKAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

Tanggal : 26 JUNI 2019

Nomor : 01

Jl. Maulana Hasanudin No. 19
Cilangkap, Kalanganyar, Lebak - Banten
Telp : (0252) 5552217 / 0818 806 498 / 085 1000 4 999 54
E-mail : atikah_mardiana@yahoo.com

AKTA NOTARIS

ATIKAH MARDIANA, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT KABUPATEN LEBAK
Jl. Maulana Hasanudin No. 19
Cempe, Cilangkap, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak
Telp. 0252- 5552217, 0818 806 498, 0851 0004 9954

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

Nomor : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2019 (duapuluh enam Juni duaribu sembilanbelas) pukul 17.30 (tujuhbelas --- lebih tigapuluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----
Berhadapan dengan saya, **ATIKAH MARDIANA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -----
Kabupaten Lebak, dengan Wilayah Jabatan Seluruh -----
Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh para saksi yang -
saya, Notaris kenal, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini;-----

1. Tuan **AGUS LUKMAN HAKIM**, lahir di Cirebon, pada ----
11-10-1979 (sebelas Oktober seribu sembilanratus
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----
Dosen, bertempat tinggal di Komplek Bumi Cadasari --
Indah, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Ciinjuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten ---
Pandeglang, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3601221110790002; -----

-Untuk sementara berada di Provinsi Banten-----

2. Tuan **ALI SALMANDE** lahir di Jakarta, pada 31-12-1984
(tiga puluh satu Desember seribu sembilanratus ----
delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Pisangan, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, ---
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, -----
Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk



SK KEMENKUMHAM



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0039805-AH.01.14 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA (JLN)

Kepada Yth.
Notaris ATIKAH MARDIANA S.H., M.Kn.
Jl. Maulana Hasanudin No. 19
Kabupaten Lebak

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris ATIKAH MARDIANA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Lebak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 05 Juli 2019 mengenai pendaftaran CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA disingkat JLN berkedudukan di Kota Tangerang Selatan telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 05 Juli 2019



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Juli 2019

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

	
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP BANTEN KPP PRATAMA PONDOK AREN JALAN RAYA BINTARO UTAMA SEKTOR V KAMPUS STAN BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN TELEPON 021-73889091 FAKSIMILE 021-73889083 SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id	
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR S-31233KT/WPJ.08/KP.1003/2019	
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :	
1. Nama	: CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: 92.666.910.2-453.000 :
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama	: 70209 - KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
4. Alamat	: JL. MUJAIR V NO. 10A RT. 003 RW. 004 BAMBU APUS, PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
5. Kategori	: Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar	: 28 Agustus 2019
7. Kewajiban Pajak	:
PPH Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 28 Agustus 2019.	
Tangerang Selatan, 28 Agustus 2019 a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan	
 EULIS RACHMAWATI NIP.197008171995092001	
*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar	

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA PONDOK AREN

JALAN RAYA BINTARO UTAMA SEKTOR V KAMPUS STAN BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN
TELEPON 021-73889091 FAKSIMILE 021-73889083 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-41PKP/WPJ.08/KP.1003/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 92.666.910.2-453.000
2. Nama : CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 70209 - KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
4. Alamat : JL. MUJAIR V NO. 10A RT. 003 RW. 004
BAMBU APUS PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 29 Januari 2020.

Tangerang Selatan, 29 Januari 2020

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,


ISTIADI HERY WIJOKO
NIP. 196909201990031008

KPP PRATAMA PONDOK AREN

NOMOR INDUK BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120109982406

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
Alamat Perusahaan	: JL. MUJAER V NO. 10A, Kel. Bambuapus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten
NPWP	: 92.666.910.2-453.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: jaringanlegislasi@gmail.com
Nama KBLI	: Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Industri Pencetakan Umum, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat
Kode KBLI	: 14131, 18111, 70209, 94121
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, hak akses kepastian dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 20 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

IZIN LOKASI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha	: CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha	: 9120109982406
Lokasi Yang Disetujui	
a. Alamat	: Jl. Mujair V no. 10A
b. Desa/Kelurahan	: Bambuaput
c. Kecamatan	: Pamulang
d. Kabupaten/Kota	: Kota Tangerang Selatan
e. Provinsi	: Banten
f. Luas Lahan	: 100 M ²
g. Rencana Kegiatan	: AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
h. Koordinat Geografis	: -6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 23 Januari 2020

Oleh : Walikota Kota Tangerang Selatan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Januari 2020

IZIN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha	: CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha	: 9120109982406
Alamat Kantor / Korespondensi	: JL. MUJAER V NO. 10A, Kel. Bambuapus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
Kode KBLI	: 70209
Nama KBLI	: AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
Lokasi Usaha	: Jl. Mujair V no. 10A, Kel. Bambuapus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha	: 23 Januari 2020
Perubahan ke -3 Tanggal	: 23 Januari 2020



IZIN KOMERSIAL



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha	:	CV JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha	:	9120109982406
Alamat Perusahaan	:	JL. MUJAER V NO. 10A
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Jl. Mujair V no. 10A
b. Desa/Kelurahan	:	Bambuapus
c. Kecamatan	:	Pannulang
d. Kabupaten/Kota	:	Kota Tangerang Selatan
e. Provinsi	:	Banten

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Pendaftaran Konsultan Hukum Bidang Teknologi Informasi
2. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 31 Desember 2019



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keakuratan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Januari 2020

NPWP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 92.666.910.2-453.000

CV. JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

JL. MUJAIR V NO. 10A RT. 003 RW. 004

BAMBU APUS, PAMULANG

KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN

KPP PRATAMA PONDOK AREN

REKENING BANK

BANK : BNI
NOMOR AKUN BANK : 1010201914
CABANG : SENAYAN
NAMA : JARINGAN
LEGISLASI NUSANTARA

Contoh Tanda Tangan

10 OCT 2019

Pengesahan Petugas
Bank



Kantor Cabang
No. Rekening
Nama

SENAYAN
: 1010201914 - IDR
: JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA

No. TB 5232230

63 - 48571

MITRA KAMI



DPRD Provinsi Banten



Pemerintah Kabupaten Serang



DPRD Kabupaten Pandeglang



DPRD Kabupaten Serang

KONTAK KERJASAMA

DIREKTUR

DR. Agus Lukman Hakim

0812 9054-3599

aguslukman091@gmail.com

DIREKTUR JARINGAN DAN KERJASAMA

M. Robbi Qawi , M.Si.

0857-12200-635

qawirimbawan@gmail.com



www.jaringanlegislasi.id